



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jln. Cut Nyak Dien Telp. (0761) 21172, 28997, 33073 Fax. (0761) 21172, 22513, 28997

E-mail : bkd@riau.go.id Website : <http://bkd.riau.go.id>

PEKANBARU - RIAU

KodePos 28126

Pekanbaru, 29 Mei 2020

Nomor : 800/BKD/3.3/V/2020/1796
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Penetapan Penilaian Angka Kredit Dalam Usulan Kenaikan Pangkat

Kepada
Yth . 1. Inspektur Provinsi Riau
2. Kepala Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
3. Sekretaris DPRD Provinsi Riau
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
5. Direktur Rumah Sakit di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
6. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau
di-
Pekanbaru

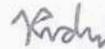
Mempedomani Surat Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor 01645/III/KR.XII/05-2020 tentang Penjadwalan dan Batas Waktu Pengusulan Kenaikan Pangkat Periode 1-10-2010 maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional XII BKN sebagaimana tersebut diatas, salah satu kelengkapan persyaratan usulan kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Tertentu adalah **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Penetapan Penilaian Angka Kredit (PAK)** dari minimal **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama** sesuai dengan kewenangan dari masing masing Jabatan Fungsional;
2. **Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)** sebagaimana disebutkan pada point 1, dibuat sebagai pengganti bukti fisik DUPAK dan Pengembangan Profesi yang tidak perlu dilampirkan lagi pada saat pengajuan berkas usulan kenaikan pangkat;
3. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerbitan **SPTJM** tersebut yaitu:
 - a. Dokumen **SPTJM** merupakan kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat yang diajukan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau (BKD), sehingga tidak mengubah alur proses dan kelengkapan DUPAK (DUPAK+Bukti Fisik) yang diajukan ke masing-masing Instansi Pembina jabatan fungsional tertentu;
 - b. Dokumen **SPTJM** ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang menetapkan PAK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal Pejabat Yang Berwenang menetapkan PAK bukan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, maka **SPTJM** tetap ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang menetapkan PAK tersebut;
 - c. Untuk PAK yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, maka dokumen **SPTJM** ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari Instansi Pembina yang melaksanakan Penilaian Angka Kredit;

- d. Dokumen **SPTJM** dibuat sebagaimana lampiran pada surat ini yang mengacu kepada Surat Kepala Kantor Regional XII BKN sebagaimana tersebut diatas.
4. Berdasarkan penjelasan point 1 s/d 3 disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Intansi Pembina yang melaksanakan Penilaian Angka Kredit agar lebih cermat dalam melaksanakan Penilaian Angka Kredit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Memeriksa dengan cermat kelengkapan dokumen dan bukti fisik DUPAK, khususnya butir kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, kegiatan Tugas Pokok dan kegiatan Pengembangan Profesi;
 - c. Kantor Regional XII BKN dan BKD akan melakukan **uji petik terhadap PAK yang telah ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang menetapkan PAK;**
 - d. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara PAK yang telah ditetapkan dengan DUPAK dan bukti fisik yang diajukan, maka akan **diambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.**
5. Hal-hal lain yang masih perlu dikonsultasikan dapat disampaikan kepada Bidang Mutasi c.q. Subbidang Kepangkatan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, dengan kontak person sdr. Murina Utri – Hp. 08127642546, sdr. Indra Roza – Hp. 085265950885, sdr. Rizal - 085265806177, sdr. Fitriani - 085265588088;

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU,



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650904 199703 1 001

KOP INSTANSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa Penetapan Angka Kredit yang telah ditetapkan terhadap :

Nama / NIP	Jabatan / Unit Kerja	Nomor / Tanggal PAK	Periode Penilaian / AK
.....

Telah sesuai dengan persyaratan penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya data yang tidak benar dan tidak sesuai dalam Penetapan Angka Kredit tersebut, maka Kenaikan Pangkat PNS yang telah ditetapkan Angka Kreditnya tersebut dapat dibatalkan dan saya bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya.

Demikianlah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengesahan Keaslian dan Kebenaran PAK ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 2020

Yang Membuat Pernyataan
Jabatan

Nama

**FORMULIR USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

INSTANSI :

KENAIKAN PANGKAT : KPO / FUNGSIONAL / TUGAS BELAJAR / STRUKTURAL / PENYESUAIAN IJAZAH *)

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL		
1.	Nama		
2.	NIP		
3.	Pendidikan Terakhir	Tahun	
4.	Tempat / Tanggal Lahir		
5.	L A M A	a. Pangkat / golongan ruang / TMT/...../.....
		b. Masa kerja golongan Tahun Bulan
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK/...../.....
6.	B A R U	a. Pangkat / golongan ruang / TMT/...../.....
		b. Masa kerja golongan Tahun Bulan
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK/...../.....
7.	Atasan Langsung	a. Nama / NIP/.....
		b. Pangkat / golongan / TMT/...../.....
		c. Jabatan	

.....,20

NIP.

No. HP :

*) Lingkari sesuai jenis KP